

TESIS

**EKSEKUSI *BOEDEL* PAILIT YANG BERADA
DI LUAR WILAYAH HUKUM INDONESIA**



Diajukan oleh
MARIATUL FITRIAH
NIM. 2220215320033

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2024

**EKSEKUSI *BOEDEL* PAILIT YANG BERADA
DI LUAR WILAYAH HUKUM INDONESIA**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh
MARIATUL FITRIAH
NIM. 2220215320033

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2024

Judul Tesis : **EKSEKUSI *BOEDEL* PAILIT YANG BERADA DI LUAR WILAYAH HUKUM INDONESIA**

Nama : **Mariatul Fitriah**
NIM : **2220215320033**

**Disetujui,
Komisi Pembimbing**

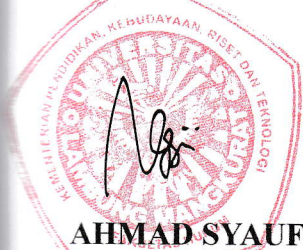
Pembimbing



**DJONI SUMARDI GOZALI
NIP. 19610619198603 1 015**

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**AHMAD SYAUFU
NIP. 19720208199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



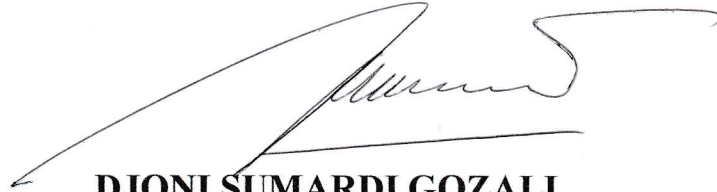
**ACHMAD FAISHAL
NIP. 19750615200312 1 001**

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

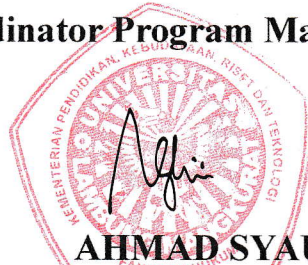
**Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal.....**

Pembimbing



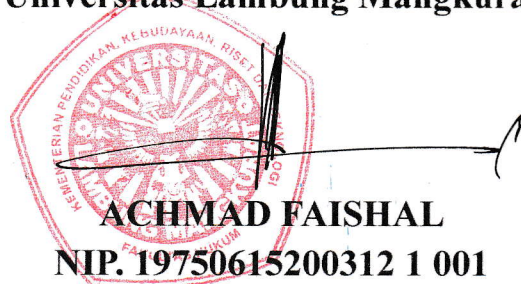
**DJONI SUMARDI GOZALI
NIP. 19610619198603 1 015**

**Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**AHMAD SYAUFU
NIP. 19720208199903 1 004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**ACHMAD FAISHAL
NIP. 19750615200312 1 001**

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal.....

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua	: Rachmadi Usman
Sekretaris	: Lena Hanifah
Anggota	: Djoni Sumardi Gozali

LEMBAR PERSEMBAHAN

KUPERSEMBAHKAN TESIS INI UNTUK:
KEDUA ORANGTUA TERCINTA,
(ALM) AKHMAD KUSASI DAN HJ. CIRIYANI, S.E.
ADIKKU TERKASIH,
GOYFA ROMYZA ACHMAD
DAN ALMAMATER YANG KUBANGGAKAN,
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM,
FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al Insyirah Ayat 6)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mariatul Fitriah

NIM : 2220215320033

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Hukum Ekonomi

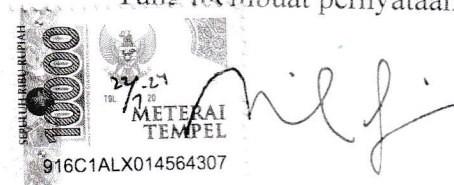
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 22 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



MARIATUL FITRIAH

NIM. 2220215320033

FITRIAH, MARIATUL. 2024. EKSEKUSI *BOEDEL* PAILIT YANG BERADA DI LUAR WILAYAH HUKUM INDONESIA. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum., 105 Halaman.

RINGKASAN

Kepailitan yang mengandung unsur asing di dalamnya, dalam hal ini yang bersifat lintas batas negara dikenal dengan istilah kepailitan transnasional/kepailitan lintas batas negara (*cross-border insolvency*). Dijatuhinya putusan pailit terhadap debitur akan menimbulkan suatu akibat hukum, yakni hilangnya kewenangan debitur untuk mengelola harta kekayaannya. Terhadap debitur yang telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dapat dimohonkan pelaksanaan eksekusi atas *boedel* pailit milik debitur, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun yang berada di luar wilayah hukum Indonesia. Selain memiliki harta kekayaan yang berada di wilayah hukum Indonesia, tentunya tidak menutup kemungkinan untuk debitur memiliki harta kekayaan yang berada di luar wilayah hukum Indonesia. Permasalahan yang sering terjadi dalam kepailitan lintas batas negara (*cross-border insolvency*) adalah apabila debitur memiliki harta kekayaan yang berada di luar wilayah hukum Indonesia. Saat ini Undang-Undang Kepailitan di Indonesia menganut dualisme prinsip, yaitu prinsip teritorial dan prinsip universal, sehingga berakibat pada sulitnya pelaksanaan isi putusan (eksekusi) oleh kurator terhadap *boedel* pailit yang berada di luar wilayah hukum Indonesia, dan terhadap permasalahan tersebut lantas solusi apa yang dapat dilakukan untuk bisa melaksanakan isi putusan (eksekusi) atas *boedel* pailit yang berada di luar wilayah hukum Indonesia.

Pada dasarnya ruang lingkup dalam kepailitan transnasional/kepailitan lintas batas negara (*cross border insolvency*) hampir sama dengan kepailitan nasional pada umumnya yang terdiri dari debitur, kreditur, dan adanya utang yang harus dibayarkan. Namun, dalam kepailitan transnasional/kepailitan lintas batas negara (*cross border insolvency*) terdapat unsur-unsur asing di dalamnya. Unsur asing merupakan suatu pertautan dengan sistem hukum lain di luar dari forum yang ditentukan dalam perjanjian (negara tempat pengadilan yang mengadili perkara) dan pertautan itu sebenarnya ada di dalam fakta-fakta dari perkara. Dengan adanya unsur-unsur asing dalam perkara kepailitan membuat perkara kepailitan tersebut masuk ke dalam ranah HPI. Dalam kepailitan transnasional/kepailitan lintas batas negara (*cross-border insolvency*) dikenal dua prinsip, yaitu prinsip teritorial dan prinsip universal. Perbedaan paling mendasar dari dua prinsip tersebut adalah terdapat pada lingkup penerapan hukumnya. Pada Prinsip teritorial digunakan untuk keberlakuan putusan pengadilan Indonesia di luar negeri dan putusan asing di

Indonesia yang sama-sama tidak dapat dilaksanakan karena terkendala kedaulatan negara masing-masing, sedangkan prinsip universal digunakan dalam keberlakuan putusan pailit Indonesia di luar wilayah hukum Indonesia. Adanya dualisme dalam Undang-Undang Kepailitan membuat kurator mengalami kesulitan dalam melakukan pemberesan *boedel* pailit yang berada di luar wilayah hukum Indonesia. Undang-Undang Kepailitan belum mengatur mengenai kewenangan kurator dalam melaksanakan isi putusan (eksekusi) *boedel* pailit yang berada di luar wilayah hukum Indonesia. Tidak diaturnya mengenai kewenangan kurator dalam mengeksekusi *boedel* pailit di luar batas yurisdiksi Indonesia membuat kurator kesulitan untuk melaksanakan pemberesan *boedel* pailit milik debitur yang berada di luar negeri, ditambah lagi adanya dualisme prinsip dalam kepailitan lintas batas negara (*cross-border insolvency*), yaitu prinsip teritorial dan prinsip universal yang membuat pelaksanaan isi putusan (eksekusi) *boedel* pailit yang berada di luar wilayah hukum Indonesia tidak dapat secara otomatis dapat dilakukan.

Oleh karena dalam Undang-Undang Kepailitan yang berlaku di Indonesia saat ini belum mengatur mengenai pelaksanaan eksekusi *boedel* pailit yang berada di luar wilayah hukum Indonesia, maka solusi bagi permasalahan kepailitan lintas batas negara (*cross-border insolvency*) adalah dengan diadakannya perjanjian internasional antar negara. Namun, hingga saat ini Indonesia tidak memiliki perjanjian-perjanjian internasional dengan negara mana pun terkait kepailitan transnasional/kepailitan lintas batas negara (*cross-border insolvency*), khususnya dalam hal pelaksanaan isi putusan (eksekusi) atas *boedel* pailit yang berada di luar wilayah hukum Indonesia. Solusi lain yang dapat dilakukan adalah dengan mengadopsi sebuah contoh undang-undang (*Model Law*) yang memungkinkan putusan pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan asing dapat dieksekusi oleh pengadilan suatu negara. Contoh undang-undang (*Model Law*) yang dimaksud adalah UNCITRAL *Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment* yang diadopsi pada tahun 1997. Namun, hingga saat ini Indonesia belum mengadopsi ketentuan-ketentuan dalam UNCITRAL *Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment* pada peraturan kepailitan nasionalnya. Apabila Indonesia mengadopsi ketentuan-ketentuan dalam *Model Law* yang dihasilkan oleh UNCITRAL, maka permasalahan pelaksanaan isi putusan (eksekusi) atas *boedel* pailit debitur yang berada di luar wilayah hukum Indonesia bisa secara otomatis dilaksanakan, terlebih lagi bagi negara-negara penganut prinsip teritorial, contoh undang-undang (*Model Law*) ini akan sangat membantu untuk mengakui dan mengeksekusi putusan pailit pengadilan asing, dan begitupula sebaliknya demi menjaga hak dan kewajiban para pihak.

FITRIAH, MARIATUL. 2024. EKSEKUSI BOEDEL PAILIT YANG BERADA DI LUAR WILAYAH HUKUM INDONESIA. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Prof. Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.,** 105 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci: dualisme, eksekusi, prinsip teritorial, prinsip universal

Saat ini terdapat inkonsistensi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terkait permasalahan kepailitan lintas batas negara (*cross-border insolvency*) yang menganut dualisme prinsip, yaitu prinsip teritorial dan prinsip universal, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang berakibat pada sulitnya pelaksanaan isi putusan (eksekusi) terhadap *boedel* pailit yang berada di luar wilayah hukum Indonesia oleh kurator. Maka solusi bagi permasalahan kepailitan lintas batas negara (*cross-border insolvency*) adalah dengan diadakannya perjanjian internasional antar negara yang mengatur eksekusi atas *boedel* pailit yang berada di luar wilayah hukum Indonesia dan bisa juga dengan mengadopsi sebuah contoh undang-undang (*Model Law*) yaitu UNCITRAL *Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment* yang diadopsi pada tahun 1997. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh inkonsistensi terkait dualisme prinsip dalam Undang-Undang Kepailitan terhadap tugas kurator dalam pemberesan *boedel* pailit milik debitur yang berada di luar wilayah hukum Indonesia dan menganalisis solusi apa yang dapat dilakukan untuk bisa melaksanakan eksekusi harta pailit atau *boedel* pailit yang berada di luar wilayah hukum Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*), dengan penilitian yang bersifat persfektif. Pendekatan penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*).

FITRIAH, MARIATUL. 2024. BOEDEL PAILIT'S EXECUTION IS OUT OF INDONESIA'S LAW. Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University, Advisor: **Prof. Dr. Djeni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum**, 103 pages.

ABSTRACT

Keywords: dualism, execution, territorial principle, universal principle

Currently, there is inconsistency in the Law of Republic of Indonesia No. 37 of 2004 on Insolvency and Delay of Debt Payment Obligations, relating to the problem of cross-border insolvency, which follows the dualism of principles, such as territorial principles and universal principles. This creates legal uncertainty resulting in the difficulty of the execution of the judgment against the bankruptcy estate that is outside the jurisdiction of Indonesia by the curator. So, the solution to the problem of cross-border insolvency is to establish an international treaty between states that regulates the execution of the bankruptcy estate that is outside the jurisdiction of Indonesia and can also be adopted by adopting a Model Law (UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment) adopted in 1997. The purpose of this study is to analyse the impact of inconsistencies related to the dualism of principles in the Insolvency Act on the duty of curator in the notification of the bankruptcy estate belonging to the debtor who is outside the territory of Indonesian law and to analyse what solutions can be done to be able to carry out the execution of the bankruptcy estate which is outside Indonesia's territory. The type of research used is normative law research or doctrinal law research, with perspective examination. The research approach is conducted using a statute approach and a conceptual approach. Legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. Technique of collection of legal materials carried out with the study of the library (library research).

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala anugerah dan karunia-Nya, serta shalawat serta salam kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat Beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa tesis dengan judul **EKSEKUSI BOEDEL PAILIT YANG BERADA DI LUAR WILAYAH HUKUM INDONESIA**, dalam rangka syarat mendapatkan Gelar Magister Hukum.

Dalam penulisan ini, Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak luput dari kekurangan baik dari segi substansi, tata bahasa, maupun dari segi teknis penulisan. Dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk perbaikan tesis ini.

Dalam rangka penyusunan tesis ini penulis telah mendapatkan bantuan dan kemudahan dari berbagai pihak hingga selesainya tesis ini. Dengan demikian, maka dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

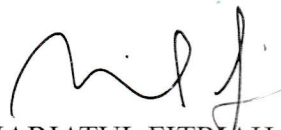
1. Kedua orangtua Penulis, (Alm) Bapak Akmad Kusasi dan Ibu Hj. Ciriyani, S.E., tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan baik dari segi moril maupun materiil bagi Penulis dan tak lupa pula Penulis sampaikan ucapan terima kasih untuk adinda Goyfa Romyza Achmad terkasih karena sudah memberikan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini hingga selesai;
2. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
3. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. Selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
4. Bapak Prof. Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, bantuan dan arahan serta masukan bagi penulis hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
5. Bapak dan Ibu Dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji penulis atas penulisan tesis ini;

6. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan berpikir selama perkuliahan;
7. Para Staf Akademik Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
8. Sahabat-sahabat Penulis tersayang, Al Akbar Raudatul Mindayani dan Gusti Kanzania Finansi, yang tidak pernah lelah dan bosan memberikan semangat dan doa bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
9. Teman-teman penulis angkatan 2022 Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, khususnya Kelas A dan Kelas Hukum Ekonomi, yang telah menemani masa perkuliahan penulis dengan penuh kenangan dan kebersamaan;
10. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi berarti dalam penyelesaian Penulisan Tesis ini;

Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini hingga selesai. Besar harapan Penulis agar tesis ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Banjarmasin, Juli 2024
Hormat Penulis



MARIATUL FITRIAH, S.H.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Rumusan Masalah
	C. Keaslian Penelitian
	D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
	E. Tinjauan Pustaka
	F. Metode Penelitian
	G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan
	1
	9
	10
	14
	16
	42
	49
BAB II	INKONSISTENSI TERKAIT DUALISME PRINSIP DALAM UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP TUGAS KURATOR DALAM PEMBERESAN <i>BOEDEL</i> PAILIT YANG BERADA DI LUAR WILAYAH HUKUM INDONESIA
	A. Dualisme Prinsip dalam Kepailitan Transnasional/ Kepailitan Lintas Batas Negara (<i>Cross-Border Insolvency</i>)
	51
	B. Peran Kurator dalam Pemberesan <i>Boedel</i> Pailit pada Kepailitan Transnasional/Kepailitan Lintas Batas Negara (<i>Cross-Border Insolvency</i>)
	72

BAB III	ALTERNATIF-ALTERNATIF HUKUM LAIN UNTUK PERMASALAHAN PELAKSANAAN ISI PUTUSAN (EKSEKUSI) ATAS <i>BOEDEL</i> PAILIT YANG BERADA DI LUAR WILAYAH HUKUM INDONESIA SELAIN MELALUI PENGADILAN NIAGA	
	A. Perjanjian Internasional dalam Penyelesaian Kepailitan Lintas Batas Negara (<i>Cross-Border Insolvency</i>)	80
	B. Penerapan UNCITRAL <i>Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment</i>	84
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	103
	B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		